



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Menanti Penetapan Tersangka Korupsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

**LEBONG** – Penyidik Pidana Khusus (Pid-sus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan Rp1,1 miliar. Padahal, saat ini Penyidik Pid-sus Kejari Lebong sudah mengantongi cukup alat bukti yang sudah menjurus ke para tersangka dalam kasus ini.

Alat bukti ini, didapatkan penyidik Pid-sus Kejari Lebong dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 20 orang saksi dan alat bukti yang disita dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada 4 Februari 2025 di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong dan Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong.

“Pastinya kita semua menanti penetapan tersangka dalam kasus ini,” kata tokoh pemuda Lebong, sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu Wijaya, S.Pd, Minggu, 16 Februari 2025.

Selain itu, Anjar meminta penyidik Pid-sus Kejari Lebong lebih terbuka ke publik dalam menyidiki kasus ini. Karena, perkembangan kasus ini terus dinanti-nantikan oleh publik, terutama oleh masyarakat Kabupaten Lebong.

“Kita minta Kejari terbuka. Setiap perkembangan kasus ini harus disampaikan ke publik,” tegasnya.

Disisi lain, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Melyan Sori turun mendesak Kejari Lebong untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR-P Lebong. “Jika sudah ada pihak yang terbukti bersalah dalam kasus ini, segera tetapkan tersangka,” ujar Melyan Sori.

Melyan Sori juga meminta pihak Kejari Lebong dapat mengali kasus ini hingga ke akar-akarnya. Agar semua pihak terlibat dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Usut tuntas kasus ini (Dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, red) sampai ke akar-akarnya,” tegas Melyan Sori.

Sementara itu, Kajari Lebong, Evi Hasibuan, SH., MH., melalui Kasi Pid-sus, Robby Rahditio Dharma, SH., MH., meminta agar bersabar. Sebab, saat ini pihak Penyidik Pid-sus masih mendalami kasus ini. “Sabar ya. Kita masih bekerja, jika ada perkembangan terbaru tentu kami sampaikan,” kata Robby.

Robby memastikan, pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Sebab, ada proses yang harus dilalui, seperti mengumpulkan minimal dua alat bukti, meminta keterangan ahli, dan melakukan audit kerugian keuangan Negara (KN).

Karena, angka Rp1,1 miliar tersebut merupakan nilai total anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Dinas PUPR-P Lebong Tahun Anggaran (TA) 2023. “Saat penetapan tersangka, tentu kami sampaikan. Saat ini izinkan kami fokus mendalami kasus ini terlebih dahulu,” singkatnya.

Untuk diketahui, Kejari Lebong sedang mendalami dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipusaran Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif. Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga dikorupsi Rp1,1 miliar.

Seharusnya anggaran ini, digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ringan, termasuk untuk tebas bayang dan tambal sulam.

Diduga anggaran itu dikorupsi dengan modus penerbitan LPJ fiktif. Informasi diterima RB, dalam penggunaan anggaran Rp1,1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Lebong.

Dalam realisasi dilapangan, ternyata kegiatan itu tidak benar-benar dilaksanakan. Namun, anggaran Rp1,1 miliar itu dicairkan.

Pencairan anggaran Rp1,1 miliar itu dilakukan dengan cara pembuatan LPJ fiktif oleh oknum pejabat di Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Kabupaten Lebong. Dengan modus LPJ fiktif ini, pengajuan pencairan anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong bisa dilakukan.

Saat ini pihak Penyidik Pid-sus Kejari Lebong sudah mengantongi semua dokumen kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2023 itu.

Termasuk dokumen pencairan anggaran yang dilakukan oleh BKD Lebong. Dokumen ini didapatkan Penyidik Pid-sus Kejari Lebong dari hasil penggeledahan Ruang Bina Marga Dinas PUPR-P Lebong dan Kantor BKD Lebong, Selasa 4 Februari 2025.

Dari penggeledahan itu, Penyidik Pid-sus berhasil menyita tiga boks besar dan satu koper berisikan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. Pengeledahan pertama kali berlangsung di Ruang Bidang Bina Marga Dinas PUPR-P Lebong, berlangsung sejak Pukul 10.00 WIB hingga Pukul 13.23 WIB. Dari penggeledahan itu, Penyidik Pid-sus berhasil mengamankan dua boks besar, dan satu koper berisikan dokumen kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2023.

Kemudian, sekitar Pukul 13.30 WIB, Penyidik Pid-sus dikawal pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di Kantor BKD Lebong berlangsung sejak Pukul 13.30 WIB hingga Pukul 15.30 WIB.

Dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor BKD Lebong, penyidik Pid-sus Kejari Lebong berhasil mengamankan 1 boks besar dokumen yang diduga LPJ fiktif dan Surat Pertanggungjawaban (Spj) pembayaran kegiatan yang dilaksanakan. **(eng)**